

PERAN JEJARING PENGELOLA SAMPAH MANDIRI (JPSM) SEHATI DALAM PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA

Hijrah Purnama Putra¹, Rini Darmawati², dan Ani Sumiarti³

¹ Program Studi Teknik Lingkungan, FTSP, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

² Program Studi Arsitektur, FTSP, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

³ Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Sehati Kabupaten Sleman, Yogyakarta
Email: hijrah@uii.ac.id

ABSTRAK

Kuantitas sampah yang diproduksi terus meningkat setiap tahunnya, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah. Namun, peningkatan tersebut cenderung tidak sebanding dengan kemampuan pengelolaannya. Melalui Jakstrada, ditargetkan pengelolaan 100% dapat dilakukan pada tahun 2025, namun membutuhkan peran serta masyarakat yang tinggi agar target tersebut dapat tercapai. Yogyakarta memiliki tingkat pertumbuhan kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang tinggi, khususnya Kabupaten Sleman yang hingga saat ini telah memiliki 147 lokasi, dengan bentuk kegiatan yang beragam, seperti bank sampah, sedekah sampah, TPS 3R dan bentuk pengelolaan sampah mandiri lainnya. Namun, diakui pertumbuhannya belum merata baik ditingkat kecamatan (kapanewon) maupun kelurahan (kalurahan). Berdasarkan analisis didapatkan pengaruh dari peran Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Sehati Kabupaten Sleman sebagai organisasi induk. Sehingga pemetaan lokasi, potensi dan tantangan penting untuk dilakukan, sembari merestrukturisasi organisasi induk agar dapat memberikan performa dalam proses pembimbingan, koordinasi dan penghubung dengan berbagai stakeholder.

Kata kunci: Bank Sampah, TPS 3R, Sedekah Sampah, JPSM Sehati

ABSTRACT

The quantity of waste produced continues to increase every year, along with the increase in the population in a region. However, such improvements tend not to be comparable to their management capabilities. Through Jakstrada, 100% management can be achieved by 2025, but requires high community participation in order for the target to be achieved. Yogyakarta has a high growth rate of community-based waste management activities, especially Sleman Regency which until now has had 147 locations, with various forms of activities, such as waste banks, waste alms, TPS 3R and other forms of independent waste management. However, it is recognized that the growth has not been evenly distributed at the sub-district level (kapanewon) and the village (kalurahan). Based on the analysis obtained influence from the role of Independent Waste Management Network (JPSM) Sehati Sleman Regency as the parent organization. So that mapping the location, potentials and challenges is important to do, while restructuring the parent organization in order to provide performance in the process of mentoring, coordination and liaison with various stakeholders.

Keywords: Waste Bank, TPS 3R, Alms Waste, JPSM Sehati

PENDAHULUAN

Kuantitas sampah yang diproduksi terus meningkat setiap tahunnya, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah. Kependudukan memang menjadi salah satu faktor dengan urutan teratas dalam mempengaruhi kuantitas sampah, disamping faktor lain seperti ketersediaan infrastruktur, pola hidup/gaya hidup, dan teknik pengemasan produk (Damanhuri dan Padmi, 2008; Damanhuri dan Padmi, 2016).

Peningkatan jumlah sampah ini, pada umumnya cenderung tidak sebanding dengan kemampuan pengelolaannya, terutama pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, mulai dari pendanaan yang minim, manajemen yang kurang profesional, sarana prasarana hingga aspek geografis wilayah yang sulit di akses (Haryono, 2002; Ahmed dan Ali, 2004; Damanhuri, 2008b; Dirjen Cipta Karya, 2010; Meidiana dan Gamse, 2010; Filho, dkk. 2016; Putra, dkk. 2019). Akhirnya sampah pun menjadi tantangan hampir di setiap wilayah di Indonesia.

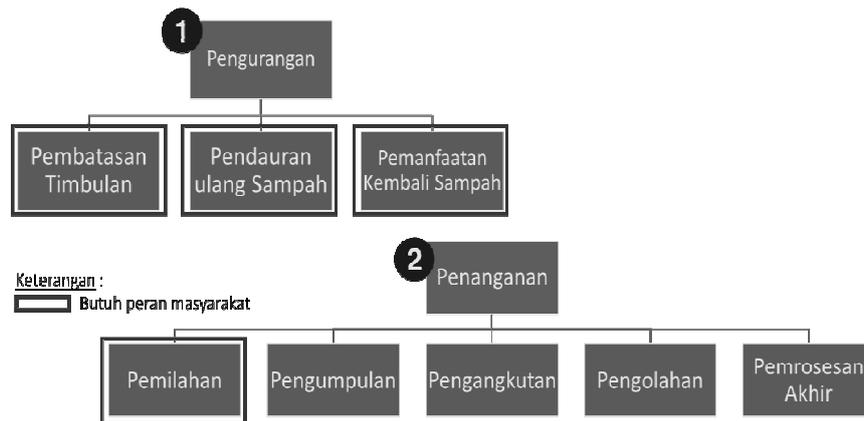
Yogyakarta pun tidak luput dari permasalahan sampah tersebut, misalnya tidak terangkutnya sampah dari sumber yang telah terjadi beberapa kali, sehingga terjadi penumpukan sampah di berbagai sudut kota. Salah satu penyebabnya adalah akses menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan Yogyakarta yang ditutup warga. Pengelolaan yang tidak maksimal, hingga isu *overloadnya* di lokasi pengolahan mencuat ke permukaan (Syamsiro, 2020; Purnomo, 2020). Praktek Kumpul-Angkut-Buang rasanya tidak lagi tepat untuk diterapkan, perlu langkah strategis untuk penerapan konsep lain seperti 3R (*Reduce*, *Reuse* dan *Recycle*) menjadi kebutuhan saat ini (Asisten Deputi Pengolahan Sampah, 2012; Raharjo dkk, 2015; Putra dkk, 2018, Putra, dkk. 2019).

Sebagai TPA Regional yang telah beroperasi sejak tahun 1996 ini, TPA Piyungan setiap

harinya menerima sampah dari 3 wilayah administrasi, yaitu Kota Yogyakarta (53%), Kabupaten Sleman (34%) dan Bantul (13%) (Putra dan Damanhuri, 2016). Sebagai ibukota provinsi, Kota Yogyakarta pastilah mendapatkan prioritas pelayanan, namun jika dilihat dari jumlah penduduk sebagai faktor utama dalam penghasil sampah, maka Kabupaten Sleman memiliki angka tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya (BPS DIY, 2020). Dengan jumlah penduduk mencapai 1.075.575 jiwa, Kabupaten Sleman memiliki potensi sampah mencapai ±775,78 ton/hari, hingga tahun 2018 baru dapat dikelola sebesar 378,1 ton/hari (48,74%) yang terbagi menjadi pengurangan 19,73% dan penanganan 29,01% (DLH Sleman, 2019).

Sesuai dengan Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) yang tertuang dalam PerBup Sleman No 33.2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, tahun 2025 ditargetkan pengelolaan sampah telah mencapai derajat sempurna (100%), dengan aktivitas pengurangan (30%) dan penanganan (70%). Dari persentase pengelolaan yang telah dilakukan pada 2018 (48,74%), masih terdapat gap yang besar untuk aktivitas pengurangan sebesar 10,27% dan 40,99% untuk penanganan sampah yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengelolaan sampah baik aktivitas pengurangan dan penanganan sampah, keduanya membutuhkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keberhasilannya. Gambar 1 adalah gambaran aktivitas yang terdapat dalam kedua bagian pengelolaan tersebut sesuai dengan UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Kepentingan untuk melakukan pemetaan terhadap prospek pengelolaan sampah berbasis masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan.



Gambar-1: Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pengurangan dan penanganan sampah

Penelitian sekaligus pengabdian ini bertujuan untuk memetakan potensi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman, dilanjutkan dengan pemetaan kebutuhan organisasi induk agar dapat menjalankan tugasnya dalam pembimbingan, koordinasi dan penghubung berbagai stakeholder. Sehingga pengelolaan sampah berbasis masyarakat memiliki kinerja optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu penelitian kuantitatif non eksperimen yang menggambarkan data kuantitatif yang diperoleh berdasarkan hasil observasi lapangan, menyangkut kuantitas dari aktivitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat di wilayah studi. Berikut adalah alur kegiatan dari penelitian, dan Tabel 1 menunjukkan model rekapitulasi yang digunakan.

1. Identifikasi lokasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat berbagai bentuk kegiatan yang dibagi per wilayah Kapanewon (Kecamatan) dari sumber sekunder;
2. Pengumpulan data menggunakan metode observasi lapangan dilengkapi *tools* kuisioner dan form wawancara terstruktur. Namun pada publikasi ini tidak ditampilkan hasil tersebut secara mendetail, agar fokus pada pemetaan lokasi dan restrukturisasi organisasi induk;
3. Teknik sampling juga menggunakan prinsip *snow ball sampling*, jika hasil observasi di satu lokasi memberikan

gambaran untuk lokasi lain yang berpotensi untuk diobservasi.

4. Wawancara dengan pengurus organisasi induk pengelola sampah berbasis masyarakat (JPSM Sehati) di Kabupaten Sleman, dalam rangka memetakan permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Peranan JPSM dihadirkan dalam pendekatan 5W + 1H.
5. Pengolahan data menggunakan sistem rekapitulasi berdasarkan lokasi dan bentuk kegiatan, dilanjutkan analisis potensi pengelolaan dari sisi organisasi/kelembagaan berdasarkan kebutuhan saat observasi berlangsung.

Berikut adalah definisi dari masing-masing kegiatan pengelolaan sampah dalam rangka mengidentifikasi kegiatan-kegiatan tersebut di masyarakat :

1. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi (PerMen LH No 13 Tahun 2012).
2. TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R, Reduce, Reuse dan Recycle) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan (PerMen PU No 03 Tahun 2013).
3. Sedekah sampah adalah modifikasi ulang dari pengelolaan sampah berbasis 3R dengan memberikan sentuhan teologi didalamnya (Fatah, dkk. 2013; Muryanti, 2016; Muhibbah, 2018)

“PERAN JEJARING PENGELOLA SAMPAH MANDIRI (JPSM) SEHATI...” (HIJRAH PURNAMA P., RINI DARMAWATI DAN ANI SUMIARTI)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi lokasi dan kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat

Kabupaten Sleman memiliki luasan total 57.482 Ha atau sekitar 18% dari luas keseluruhan Propinsi D.I.Yogyakarta, terdiri dari 17 wilayah Kapanewon (Kecamatan), 86 Kalurahan (Desa) dan 1.212 Dusun. Hingga 2019, Kabupaten Sleman memiliki penduduk sebanyak 1.075.575 jiwa, dengan tingkat kepadatan tertinggi mencapai 6.452 jiwa/km² (BPS Sleman, 2020). Beberapa wilayah Kapanewon dengan kepadatan tinggi termasuk dalam kategori risiko persampahan tinggi (SSK Sleman, 2017).

Secara umum Yogyakarta, dalam periode 2003-2011, telah terbentuk 117 kelompok pengelola sampah mandiri dan meningkat menjadi 155 kelompok pada 2015. Data pun terus meningkat hingga 792 lokasi pada 2018 (Merti Boemi Lestari, 2011; Putra dkk, 2018; Putra, dkk. 2019). Dari jumlah tersebut, sebagian besar berbentuk bank sampah (62,5%) (Putra dkk, 2018). Selain bank sampah, keaktifan

masyarakat dalam mengelola sampah diwujudkan dalam bentuk Tempat Pengolahan Sampah Berbasis 3R (TPS 3R), Sedekah Sampah (SS), Sekolah Lingkungan (SL) dan bentuk-bentuk lainnya.

Kehadiran berbagai bentuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini, diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap sistem pengelolaan sampah di Indonesia (Putra, dkk. 2019). Perkembangannya yang signifikan, menandakan sektor ini kemungkinan besar mudah diterima oleh masyarakat. Namun, tetap diperlukan banyak referensi untuk memperlihatkan kinerjanya, memetakan masalah dan menjawab tantangan operasionalnya.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dalam rangka untuk mengidentifikasi jumlah dan bentuk kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat, didapatkan 147 lokasi yang tersebar di Kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman dengan berbagai bentuk kegiatan, seperti BS, SS, TPS 3R dan PSM lainnya (Tabel 2).

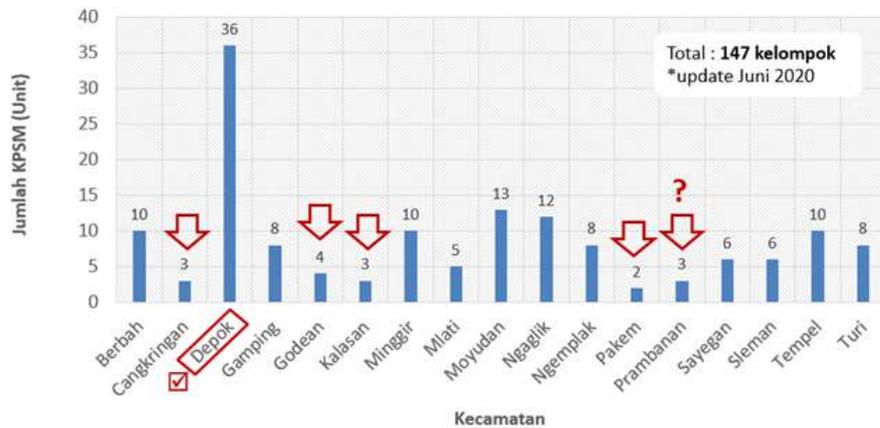
Tabel -1: Rekapitulasi Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sleman

| No | Kecamatan (Kapanewon) | Total KPSM | Bank Sampah | Sedekah Sampah | TPS 3R | PSM* |
|--------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 1 | Berbah | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Cangkringan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Depok | 36 | 26 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | Gamping | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Godean | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kalasan | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Minggir | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Mlati | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Moyudan | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Ngaglik | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | Ngemplak | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Pakem | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Prambanan | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Sayegan | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Sleman | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | Tempel | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Turi | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Total | | 147 | 102 | 13 | 20 | 12 |

Keterangan : *PSM : Pengelolaan Sampah Mandiri (belum diketahui bentuk kegiatannya)

Sebagai langkah penguatan organisasi (JPSM Sehati) identifikasi lokasi dan kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sangat penting untuk dilakukan, diantaranya adalah untuk menganalisis persebaran kegiatan

berdasarkan wilayah administrasi (Gambar 2), penguatan berbasis wilayah kerja dan pengelolaan personil yang terlibat akan menjadi masukan sebagai langkah restrukturisasi organisasi.



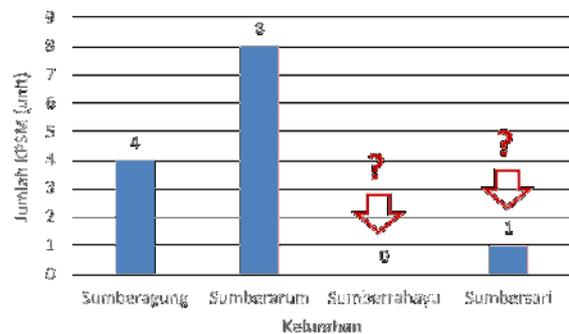
Gambar -2: Sebaran Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM) Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sleman

Pada Gambar 2 terlihat bahwa Kecamatan Depok memiliki tingkat produktivitas yang tinggi dalam hal jumlah kegiatan/lokasi, sedangkan Kecamatan Cangkringan, Godean, Kalasan, Pakem dan Prambanan menunjukkan data yang bertolak belakang. Hal tersebut menjadi perhatian bagi pengelola agar akar permasalahan dapat diidentifikasi dan menjadi bahasan untuk ditingkatkan pada masa yang akan datang. Jika didetailkan lebih lanjut, terkait per kecamatan hingga kelurahan/desa masing-masing, maka dapat diketahui lebih rinci wilayah mana saja yang masih membutuhkan koordinasi agar pengelolaan sampah berbasis masyarakat menjadi lebih baik.

Dalam konteks kewilayahan, JPSM Sehati dapat membagi Kabupaten Sleman menjadi 3 wilayah utama yaitu :

1. Wilayah Utara, terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Turi, Tempel, Sleman, Pakem dan Cangkringan;
2. Wilayah Barat, terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Sayegan, Moyudan, Mlati, Minggir, Godean, dan Gamping;
3. Wilayah Timur, terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Prambanan, Ngemplak, Ngaglik, Kalasan, Depok dan Berbah.

Gambar 3 menunjukkan persebaran KPSM di Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman yang secara total berjumlah 13 lokasi (sesuai Tabel 2). Setelah dipetakan per kelurahan, ternyata penyebarannya juga tidak merata antara satu kelurahan dengan kelurahan lainnya. Sehingga dengan adanya database pendataan diharapkan dapat mempermudah banyak hal teknis, diantaranya penentuan lokasi sosialisasi, kegiatan pendampingan, evaluasi dan monitoring, penyebaran batuan dan pendanaan, koordinasi dan kerjasama kewilayahan.



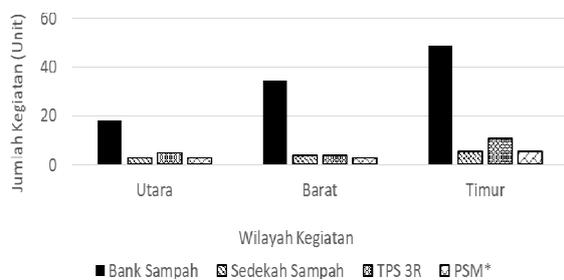
Gambar -3: Sebaran KPSM di Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman

Pembagian ini untuk mempermudah koordinasi, sehingga dalam struktur organisasi

“PERAN JEJARING PENGELOLA SAMPAH MANDIRI (JPSM) SEHATI...” (HIJRAH PURNAMA P., RINI DARMAWATI DAN ANI SUMIARTI)

JPSM akan diperlukan koordinator wilayah dan koordinator kecamatan. Gambar 4 berikut adalah sebaran KPSM jika didasarkan pada pembagian wilayah kerja seperti disampaikan di atas. Berdasarkan pemetaan tersebut, dalam struktur organisasi JPSM juga diperlukan divisi pengurus berbagai bentuk kegiatan, seperti Divisi BS, Divisi TPS 3R, Divisi SS dan Divisi SL.

Kehadiran koordinator wilayah, kecamatan dan berbagai divisi akan memperkuat struktur organisasi inti, harapannya persentase pengurangan dari 19,73% naik menjadi 30% pada tahun 2025. Sehingga tantangan keterlibatan masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah harapannya dapat terjawab dengan baik.



Gambar -4: Sebaran KPSM berdasarkan wilayah kerja di Kabupaten Sleman

Arah Pengembangan Organisasi Induk (JPSM Sehati) sebagai Pengelola Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sleman

Berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat selama ini berjalan sendiri, tanpa ikut campur organisasi sebagai perpanjangan tangan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Walaupun sebenarnya telah ada organisasi induk tersebut, yaitu Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Sehati Kabupaten Sleman. Namun, keberadaannya masih memiliki gap, baik dari segi komunikasi, koordinasi dan peran aktif. Sehingga dalam observasi lapangan menemukan banyak hambatan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola sampah menjadi kegiatan sampingan saja, pengurusannya pun selama ini seadanya saja, karena memang fokus pada pekerjaan utama. Rasa memiliki organisasi masih rendah, karena dianggap

mengelola sampah adalah aktivitas sosial. Begitu pula dengan kehadiran organisasi induk, walau sebenarnya prioritas dan produktifitas menjadi sangat penting.

- b. Ketergantungan dengan pemerintah sangat tinggi, porsi dalam mengharapkan bantuan dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Diperlukan kerja yang ikhlas demi kemajuan organisasi, bukan karena penilaian pihak lain. Kader/pengurus harus memiliki komitmen pelayanan agar sistem pengelolaan sampah di bawah dapat berjalan dengan baik.
- c. Rasa memiliki organisasi yang rendah, bergabung dalam kepengurusan menjadi jalan pintas untuk mengembangkan kegiatannya secara pribadi (aktivitas pengelolaan sampah milik pribadi pengurus). Akhirnya organisasi hanya menjadi pendorong yang tidak adil, dan bermunculanlah berbagai masalah didalamnya.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, perlulah diberikan pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait peranan dari JPSM dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman, Tabel 3 berikut adalah pendekatan 5W + 1H dalam menjawab peranan tersebut.

Tabel -2: Peranan JPSM dalam Pendekatan 5W + 1H

| No | Pendekatan | Poin Bahasan |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | What (Apa?) | Apa peran JPSM? JPSM sebagai forum komunikasi antar KPSM |
| 2 | Who (Siapa?) | Siapa anggotanya? Siapa pengurusnya? Siapa pembinanya? Siapa mitranya? Apakah selama ini cenderung <i>one man show</i> ? |
| 3 | Why (Mengapa?) | Pertanyaan yang kadang gagal untuk dijawab. Mengapa JPSM dibentuk? Untuk mengakomodir anggota, membantu dan meningkatkan produktifkat anggota, atau adanya kepentingan berbagai pihak? |
| 4 | Where (Dimana?) | JPSM harus memiliki tempat, agar anggota |

| | | |
|---|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | memiliki rumah untuk “mengadu”, “berekspresi”, “mengembangkan diri” |
| 5 | When (Kapan?) | Kapan dibentuk? kapan harus mengembangkan diri? kapan memilih pengurus baru? dan lainnya |
| 6 | How (Bagaimana?) | Bagaimana proses didalamnya? rekrutmen, sosialisasi, pengembangan anggota dll? |

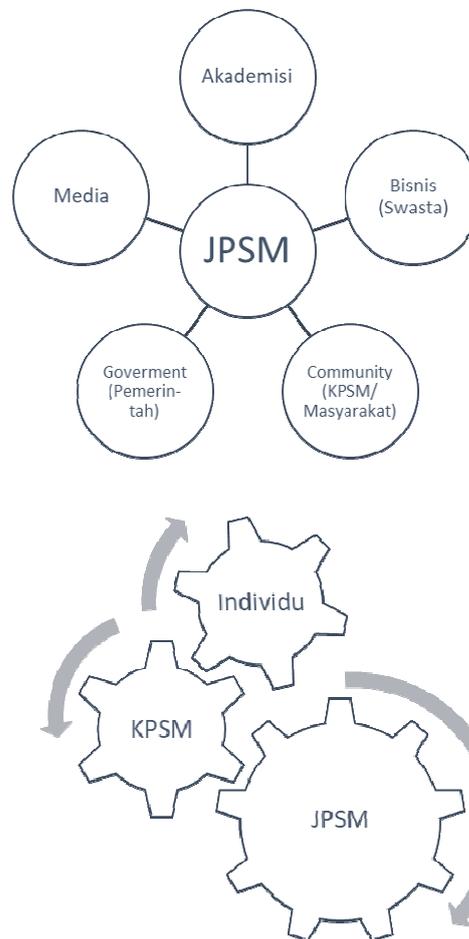
JPSM dapat berperan dalam berbagai posisi diantaranya pembimbing, penghubung, koordinator, dan lainnya) dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kinerja Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM) di wilayah Kabupaten Sleman. Dengan konsep pentahelix (ABCGM, Akademisi, Bisnis, *Community*, *Government* dan Media) kerjasama berbagai *stakeholder*, seperti terlihat pada gambar 5 berikut, disamping pengembangan JPSM ke bawah dalam membina kelompok-kelompok binaannya.

Berdasarkan konsep pentahelix tersebut, diperlukan arah pengembangan yang dapat mendukung keberhasilan roda organisasi JPSM dalam perannya membangun sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang lebih baik. Gambar 6 berikut adalah arah pengembangan JPSM Sehati Kabupaten Sleman yang direncanakan/dibagi dalam beberapa jangka waktu (pendek dan menengah).

Bermula dari berbagai tantangan yang ada, diantaranya adalah kuantitas dan kualitas sampah yang cenderung berubah seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan aktivitas yang dilakukannya, rendahnya kepedulian masyarakat, dan akses informasi yang diharapkan bersifat positif sebagai pendorong bagi akhlak yang ramah lingkungan. Diikuti dengan berbagai kendala organisasi, maka perlu dilengkapi database KPSM sebagai langkah awal seperti yang telah dijelaskan pada sub bab terdahulu di atas.

Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan berbagai strategi dalam jangka pendek, seperti penguatan/restrukturisasi organisasi dan penguatan anggota serta penyusunan program kerja, barulah pada jangka menengah dan panjang berupa pelaksanaan, pendampingan dan penguatan kegiatan kerjasama berbagai

stakeholder dalam lingkup operasional JPSM. Gambar 7 berikut adalah usulan struktur organisasi berdasarkan pemetaan kuantitas KPSM, kendala dan tantangan organisasi JPSM.



Gambar -5: Peran JPSM dalam Konsep Pentahelix (gambar atas) dan Peran JPSM ke Bawah Melalui Kelompok Binaan (KPSM : Kelompok Pengelola Sampah Mandiri) dan Individu Pengurus (gambar bawah)

KESIMPULAN

Berikut adalah kesimpulan dari penelitian terkait peran JPSM Sehati dalam peningkatan kinerja pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Sleman, Yogyakarta:

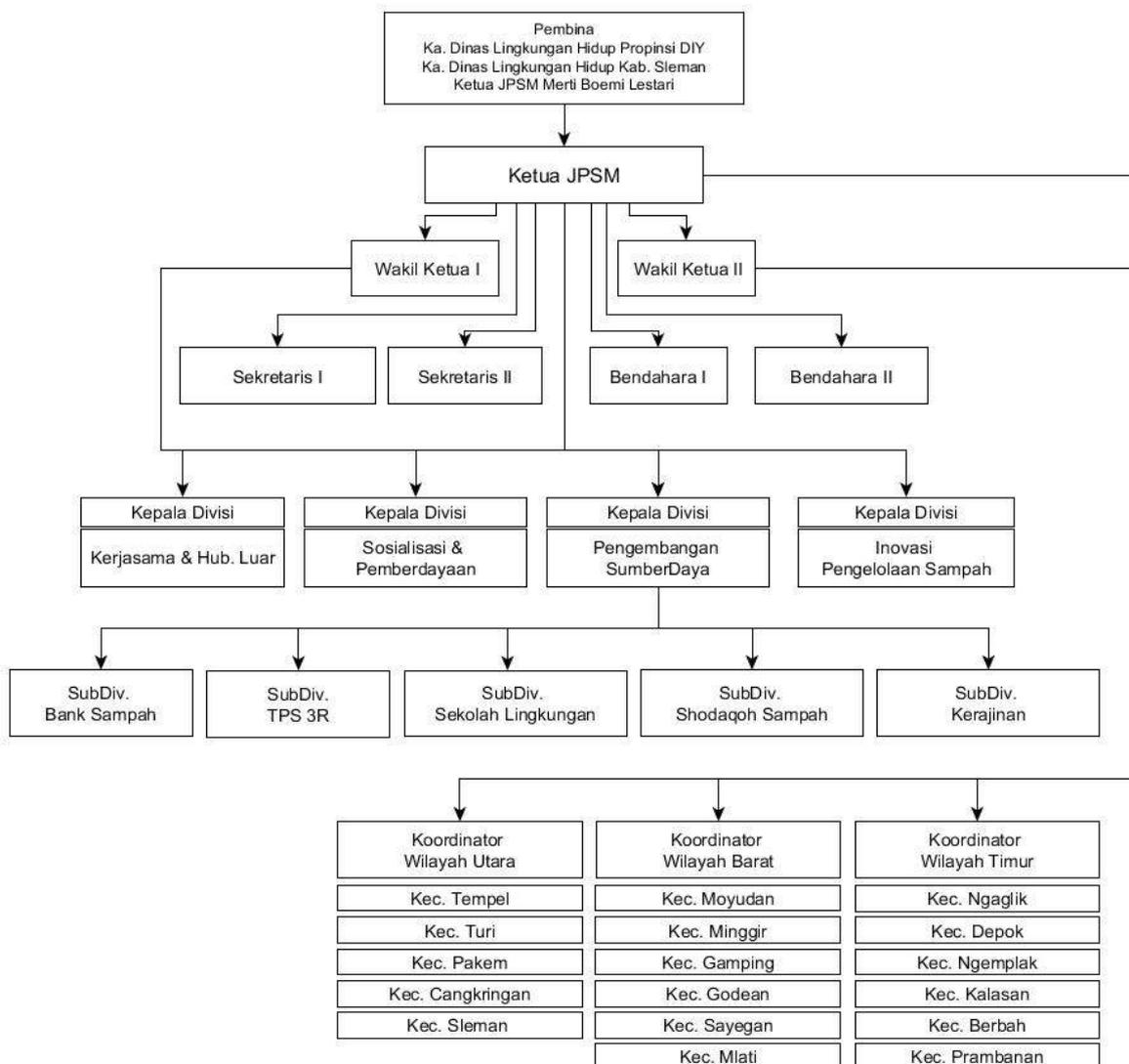
1. Hingga 2020, Kabupaten Sleman telah memiliki 147 lokasi KPSM berbagai bentuk, baik BS, SS, TPS 3R dan PSM lainnya. Namun, belum menyebar merata di setiap wilayahnya (kecamatan dan kelurahan). Sehingga diperlukan database

“PERAN JEJARING PENGELOLA SAMPAH MANDIRI (JPSM) SEHATI...” (HIJRAH PURNAMA P., RINI DARMAWATI DAN ANI SUMIARTI)

- yang update untuk memetakan dan mengetahui perkembangannya.
2. Analisis menunjukkan peran JPSM Sehati masih rendah dalam peningkatan kinerja KPSM di wilayah Kabupaten Sleman, diperlukan inovasi berupa restrukturisasi dan penguatan kelembagaan.
 3. Organisasi JPSM perlu dilengkapi dengan koordinator wilayah (utara, barat, dan timur), koordinator kecamatan dan divisi sesuai bentuk KPSM yang terdapat dimasyarakat, seperti divisi bank sampah, TPS 3R, sekolah lingkungan, sedekah sampah dan divisi kerajinan daur ulang.



Gambar -6: Arah Pengembangan JPSM Sehati Kabupaten Sleman



Gambar -7: Rekomendasi Bentuk Struktur Organisasi JPSM Kabupaten Sleman

UCAPAN TERIMA KASIH

Publikasi ini dihasilkan atas dukungan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia melalui Hibah Pengabdian Masyarakat dengan No Kontrak 25/Dir/ DPPM/80/Unggulan/III/2020. Disampaikan juga terima kasih atas dukungan pelaksanaan kegiatan dari Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Sehati Kabupaten Sleman serta berbagai KPSM dalam kegiatan observasi selama kegiatan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, S. A., Ali, M. (2004), Partnerships for solid waste management in developing countries: linking theories to realities, *Habitat International*, 28, 467–479
- Asisten Deputi Pengelolaan Sampah, (2012), Profil Bank Sampah Indonesia 2012, disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Bank Sampah 2-4 November 2012, Deputi Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta
- BPS DIY, (2020), Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2020, diakses melalui <http://diy.bps.go.id> pada 20 Desember 2020
- BPS Sleman, (2020), Kabupaten Sleman dalam Angka 2020, diakses melalui <http://sleman.bps.go.id> pada 20 Desember 2020
- Damanhuri, E. (2008b), A future prospect of municipal solid waste management in Indonesia, Keynote Lecture 5th Asian-Pacific Landfill Symposium di Sapporo, Jepang, 22-24 Oktober 2008
- Damanhuri, E., Padi, T. (2008), Diktat Kuliah TL-3104 Pengelolaan Sampah, Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Bandung, Bandung
- Damanhuri, E., Padi, T. (2016), Pengelolaan Sampah Terpadu, Penerbit ITB, Bandung
- Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2010), Rencana Strategis Sektor Persampahan 2010-2014, Kementerian Pekerjaan Umum, Indonesia
- DLH Sleman. (2019), Dokumen Masterplan Pengelolaan Sampah Kabupaten Sleman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Yogyakarta
- Fatah, A., Taruna, T., Purnaweni, H. (2013), Pengelolaan Shodaqoh Sampah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Proseding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
- Filho, W.L., Brandli, L., Moora, H., Kruopiene, Stenmarck, A. (2016), Benchmarking approaches and methods in the field of urban waste management, *Journal of Cleaner Production*, 112, 4377-4386
- Haryono, A.T. (2002), Kinerja layanan persampahan di Kota Yogyakarta, Tesis Program Studi Magister Teknik Pembangunan, Universitas Diponegoro, Semarang
- Meidiana, C., Gamse T. (2010), Development of waste management practices in Indonesia, *European Journal of Scientific Research*, Vol.40 No.2, 199-210
- Muhibbah, Z. (2018), Partisipasi Masyarakat melalui Program Sedekah Sampah di Pengajian Putri Yayasan Majelis Ta'lim At Taqwa Ngaliyan Indah Semarang, Skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang
- Muryanti. (2016), Shodaqoh Sampah : Perempuan dalam Pengelolaan Sampah di Dusun Sukunan, Desa Banyuraden, Gamping, Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Empirika* Vol 1 No 1
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Purnomo, C.W. (2020), Tak perlu kalut, TPA ditutup, Opini KR, *Harian Kedaulatan Rakyat*, 26 Desember 2020
- Putra, H. P., & Damanhuri, E., (2016), Performance and Operational of Landfill Piyungan as The Regional Landfill in Yogyakarta Special Region, Indonesia. *Proceeding of The 9th Asia-Pacific Landfill Symposium*. University of Hongkong. Hongkong
- Putra, H.P., Damanhuri, E., Sembiring, E. (2019), Sektor baru pengelolaan sampah di Indonesia (studi kasus di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul)

“PERAN JEJARING PENGELOLA SAMPAH MANDIRI (JPSM) SEHATI...” (HIJRAH PURNAMA P., RINI DARMAWATI DAN ANI SUMIARTI)

- Putra, H.P., Damanhuri, E., Sembiring, E.,
(2018), Integration of formal and informal
sector (waste bank) in waste management
system in Yogyakarta, Indonesia. Matec
Web of Conferences 154: 02007
- Raharjo, S., Matsumoto, T., Ihsan, T.,
Rachman, I., (2015), Community-based
solid waste bank program for municipal
solid waste management improvement in
Indonesia:a case study of Padang city,
Journal of Material Cycles and Waste
Management, DOI 10.1007/s10163-015-
0401-z
- SSK Sleman. (2017), Dokumen Strategi
Sanitasi Kabupaten Sleman Tahun 2017,
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Sleman, Yogyakarta
- Syamsiro, M. (2020), TPST Piyungan, Analisis
KR, Harian Kedaulatan Rakyat, 24
Desember 2020